

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diharapkan dengan upaya yang konkrit untuk mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah.

Setidak-tidaknya pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat dalam upaya keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas

dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada strata penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu dengan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Fenomena yang terjadi dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan sepanjang semester 1 tahun 2023 untuk tahun pelaporan 2022, hasil pemeriksaan BPK atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 496 (91%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 41 (8%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 5 (1%) LKPD. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Penurunan opini ini terjadi pada 4% dari 542 LKPD tahun 2022 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019-2023 secara lima tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walau sudah mendapatkan opini WTP, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu catatan yang diberikan adalah masih belum tepatnya penyusunan dokumen pelaporan penggunaan anggaran daerah dan menyelesaikan tugas laporan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku (bapelitbang.bintang.go.id, 2024).

Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, BPK juga mengungkapkan 12.855 permasalahan yang mana 7.227 permasalahan adalah mengenai ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan dengan penyerahan LKPD yang tidak tepat waktu, dan penyimpangan administrasi. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Pujanira & Taman, 2017)

Selain opini dari BPK, Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan harus disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardianto & Eforis (2019) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten tangerang. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Admaja & Wahyundaru (2020) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten semarang. Namun

penelitian tersebut tidak sejalan dengan Apriansyah *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten bungo.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan institusi pemerintah daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi. Sebagai rangka dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien (Hadis *et al.*, 2022).

Penelitian Ardianto & Eforis (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten tangerang. Hasil penelitian Rahmawati *et al.* (2018) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota tangerang selatan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan Apriansyah *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten bungo.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat. Begitu juga bagian keuangan yang harus diisi oleh Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Keuangan Daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Sehingga, tinggi-rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia mengenai pemahaman akuntansi yang berlaku akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Darmawan & Darwanis, 2018).

Penelitian Pujanira & Taman (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan provinsi DIY. Penelitian Pilander *et al.* (2018) juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota kotamobagu. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasanah & Siregar (2021) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu.

Penelitian Apriansyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan

keuangan. Penelitian Ardianto & Eforis (2019) juga menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang serupa belum banyak yang melakukan penelitiannya di Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan juga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dikarenakan hal ini peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bintan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan standar

akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan?

1.4 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Bintan.
2. Penelitian ini menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

3. Penelitian ini hanya menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat memecahkan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang akuntansi sektor publik khususnya pemerintah daerah.

2. Sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisannya di bagi menjadi dalam beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, penjelasan mengenai objek dan ruang lingkup penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode-metode analisis yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode yang telah ditentukan dan mengaitkannya dengan teori yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan/atau pembahasan penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atas penelitian yang sudah dilakukan.

